

PENGARUH UPAH MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Selvi Saputri ¹⁾, Yefriza ²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

saputriselfi082@gmail.com ¹⁾, yefriza@unib.ac.id ²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran di wilayah Kepulauan Riau periode 2018-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel dari 7 kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan merupakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 12, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan upah minimum, IPM serta jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah, perubahan upah minimum mempunyai pengaruh positif, sedangkan IPM mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Di sisi lain, jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif namun tidak penting terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu menurunkan angka pengangguran, sedangkan peningkatan IPM dapat mengurangi angka pengangguran di Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Pengangguran, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk

Abstract

This study examines the effects of the minimum wage, Human Development Index (HDI), and unemployment rate in the Riau Islands from 2018 to 2022. The analysis uses secondary data, in the form of panel data, from seven districts/cities in the Riau Islands, sourced from the Central Statistics Agency (BPS). A panel data regression analysis was performed using Eviews 12 software. The results reveal that, as a whole, the minimum wage, HDI, and population size influence the unemployment rate in the region. In some areas, changes in the minimum wage have a positive impact, while HDI significantly reduces the unemployment rate. However, the population size has a negative yet statistically insignificant effect on unemployment. The study concludes that increasing the minimum wage does not guarantee a reduction in unemployment, while enhancing the HDI is associated with a lower unemployment rate in the Riau Islands.

Keywords: Unemployment, Minimum Wage, Human Development Index, Number of Population

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan masalah yang signifikan, terutama di negara berkembang seperti negara Indonesia. Negara berkembang seringkali menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja serta jumlah penduduk yang besar. Namun, ini bukan satu-satunya masalah pengangguran. Faktanya, masalah pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta situasi politik negara, yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Seseorang yang berada dalam angkatan kerja serta sangat membutuhkan pekerjaan didefinisikan dalam bentuk pengangguran secara umum. Tingkat pengangguran, yaitu jumlah pengangguran yang dinyatakan dalam persentase terhadap jumlah orang yang bekerja, biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu negara. (Sambaulu et al., 2022).

Fenomena pengangguran terkait dengan praktik perburuan perusahaan yang menutup atau mengurangi sektor usahanya karena masalah ekonomi atau keamanan, peraturan yang membatasi investasi, pembatasan prosedur ekspor serta impor, serta lain-lain. Selain itu, peningkatan pengangguran dapat berdampak di kondisi sosial serta politik, seperti peningkatan kejahatan serta ketidakstabilan politik. Selain itu,

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 29 Januari 2025

Published : 27 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



pengangguran akan menjadi penyebab munculnya penduduk miskin baru serta mendorong peningkatan kemiskinan karena pengangguran akan berdampak di berkurangnya total pendapatan negara (Febriani et al., 2021). Tingkat pengangguran yang masih tinggi menunjukkan bahwa program serta upaya pemerintah federal untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah-daerah tersebut belum berhasil (Putra et al., 2021). Jadi pemerintah harus mengambil keputusan yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini.

Kepri merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran perkotaan tertinggi di Pulau Sumatera, sehingga menjadikan TPT Kepri menjadi permasalahan besar untuk diteliti. Hal inilah yang menyebabkan peneliti memilih TPT dalam bentuk variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera antara tahun 2019 hingga 2022 berada di wilayah Kepulauan Riau. Dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu di tahun 2022, provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Pulau Sumatera, Pulau Riau berbeda jauh yaitu 4,64%. Melihat angka tersebut, Kepulauan Riau mengalami permasalahan pengangguran yang serius.

Hal ini menjadi kekhawatiran utama bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau, mengingat tingginya angka pengangguran yang dilaporkan di wilayah tersebut. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Di penelitian ini akan dianalisis tiga variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di wilayah Kepulauan Riau. Variabel-variabel tersebut meliputi upah minimum, IPM serta jumlah penduduk.

Tabel 1. Upah Minimum, IPM serta Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera

Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera Tahun 2022			
Provinsi	Upah Minimum (Rp)	IPM	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
Aceh	3.166.460,00	74,11	5407,90
Sumatera Utara	2.522.609,94	74,51	15115,20
Sumatera Barat	2.512.539,00	75,16	5640,60
Riau	2.938.564,01	74,45	6614,40
Jambi	2.698.940,87	73,11	3631,10
Sumatera Selatan	3.144.446,00	72,48	8657,00
Bengkulu	2.238.094,31	73,68	2060,10
Lampung	2.440.486,18	71,79	9176,60
Kepulauan Bangka Belitung	3.264.884,00	73,50	1494,60
Kepulauan Riau	3.050.172,00	78,48	2179,80

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Dari Tabel 1, alasan peneliti hanya mengambil data tahun 2022 merupakan untuk menjelaskan situasi upah minimum, IPM serta jumlah penduduk di tahun terakhir penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini. Proses pembangunan baru menekankan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia serta mengembangkan produktivitas manusia yang akan berdampak di penurunan angka pengangguran. Artinya IPM berpengaruh terhadap penurunan angka pengangguran. Sedangkan jika dilihat di tabel 1, Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan IPM tertinggi di Kepulauan Sumatera, namun merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Keadaan ini berbeda dengan pandangan baru yang sedang berkembang serta keadaan ini juga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya seperti (Mahroji & Nurkhasanah, 2019), bahwa IPM berdampak negatif terhadap pengangguran di wilayah Banten. Sebuah penelitian dari (Astrid & Soekapdjo, 2020) mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas maka permasalahan penelitian ini merupakan bagaimana dampak upah minimum, IPM serta jumlah penduduk serta tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau periode 2018 – 2022.

Wilayah Kepulauan Riau mempunyai tingkat IPM tertinggi di antara Kepulauan Sumatera, namun menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi menjadi permasalahan yang perlu diwaspadai karena tidak sesuai dengan konsep pertumbuhan baru. Berdasarkan informasi yang diberikan, tujuan penelitian ini merupakan untuk menganalisis dampak upah minimum, IPM serta jumlah penduduk serta tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau periode 2018 – 2022.

A. Pengangguran

Pengangguran terjadi di semua negara, terutama pengangguran informal, yang mengarah di masa transisi ketika seseorang meninggalkan pekerjaan lamanya tanpa mencari pekerjaan baru, atau ketika ia masuk sekolah pascasarjana serta mencari pekerjaan (Mankiw, 2011). Pengangguran sendiri merupakan keadaan seseorang di pasar tenaga kerja yang sesertag mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan (Michael P, 2003).

Tingkat jaminan sosial di suatu wilayah dapat tercermin dari tingkat pengangguran. Pengangguran terus menjadi permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah (Florennica & Febriani, 2023). Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, permintaan serta penawaran ditentukan. Jika peningkatan permintaan tenaga kerja sama dengan peningkatan penawaran tenaga kerja di tingkat upah tertentu, pasar akan hilang. Hal ini dikarenakan kurva permintaan menunjukkan kuantitas tenaga kerja yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang akan disediakan rumah tangga serta mempunyai kemiringan positif terhadap upah (Ramadhani, 2023).

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan jumlah penduduk dan upah minimum memiliki dampak langsung terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Sebaliknya, penelitian Mita & Usman (2018) di Jawa Barat menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kepulauan Riau memiliki hubungan negatif dengan pengangguran, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh faktor demografi terhadap pasar tenaga kerja dapat berbeda antar daerah.

B. Upah Minimum

Upah minimum merupakan aturan pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pekerja yang paling rendah dengan upah yang setidaknya sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak Pekerja (KHL) (Soedarjadi, 2008). Pendapatan, daya beli, serta kesejahteraan sosial pekerja dipengaruhi langsung oleh ketentuan upah minimum provinsi masing-masing provinsi. Upah minimum provinsi mempengaruhi kehidupan ribuan pekerja di seluruh Indonesia. Itu bukan hanya angka statistik (Alpino & Rusdi, 2024), tetapi juga merupakan ukuran persaingan daerah dalam menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja (Simanjuntak & Yefriza, 2024).

Menurut Teori Neoklasik dalam pansertagan neoklasik, peningkatan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar (yaitu, tingkat upah yang seharusnya terjadi tanpa intervensi) dapat menyebabkan pengangguran. Ini karena jika upah minimum ditetapkan lebih tinggi dari upah pasar, beberapa pekerja yang kurang produktif atau dengan keterampilan rendah mungkin tidak dapat memenuhi standar tersebut, sehingga mereka mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan. Di sisi lain, beberapa perusahaan mungkin mengurangi jumlah pekerja yang mereka pekerjakan atau bahkan mengurangi jam kerja untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Menurut (Ningrum, 2017) menemukan bahwa upah minimum memiliki efek positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Menurut penelitian ini, kenaikan upah minimum memiliki efek positif serta signifikan terhadap pengangguran, sejalan dengan penelitian (Sutansyah Effendy, 2018),

(Wafirrotullaela & Bawono, 2023), (Mulyadi et al., 2022) Di sisi lain, penelitian (Tridiana & Widyawati, 2018) menemukan bahwa upah minimum justru berdampak negatif di pengangguran karena dapat memotivasi pencari kerja untuk menerima pekerjaan yang ada. Ini menegaskan bahwa efek upah minimum tidak seragam di semua wilayah serta sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar tenaga kerja lokal.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pertumbuhan baru menekankan bahwa meningkatkan produktivitas manusia melalui pengembangan sumber daya manusia, yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, dapat memicu penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Dalam teori Keynes, kesempatan kerja dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan total rendah, perusahaan akan mengurangi produksinya, yang berdampak pada rendahnya kontribusi mereka terhadap pasar tenaga kerja. Akibatnya, baik permintaan maupun penawaran tenaga kerja tidak berubah, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan penelitian Pardosi dan Septriani (2023), terdapat hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran, di mana IPM dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah serta perubahan yang terjadi di pasar tenaga kerja dan pemerintahan. Selain itu, faktor politik dan ekonomi turut mempengaruhi angka pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering digunakan untuk menilai kesejahteraan manusia di berbagai negara (Permana & Pasaribu, 2023).

Jika nilai IPM suatu daerah tinggi maka tingkat pengangguran akan menurun, namun sebaliknya jika nilai IPM rendah maka tingkat pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Studi ini menemukan bahwa IPM berdampak negatif yang signifikan di pengangguran, sejalan dengan temuan (Nashih et al., 2024) di pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang baik berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran. Namun berbeda dengan temuan (Palindungan & Bakar, 2021), penelitian ini menunjukkan bahwa IPM yang tinggi tidak selalu cukup untuk mengatasi pengangguran, apalagi jika pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja tidak konsisten serta meningkatkan kualitas pelayanan. Kepulauan Riau, meski memiliki IPM tertinggi di Pulau Sumatera, namun masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selain tingkat lapangan kerja, faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi regional serta imigrasi juga harus diperhitungkan untuk menganalisis pengangguran secara rinci.

D. Jumlah Penduduk

Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan pangan. Artinya, seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah pekerja pun bertambah, namun hal ini tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang lebih sedikit berarti para pekerja harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ada yang tidak mendapatkan pekerjaan serta menjadi pengangguran.

Sebagai (D. Prasetyo dkk., 2023), Penduduk merupakan setiap orang yang telah menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama enam bulan atau yang telah menetap kurang dari enam bulan tetapi hendak bertempat tinggal di sana. Jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan metode sensus atau penambahan penduduk. Angka yang dimaksud merupakan kompilasi data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu lima tahun. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, terdapat tiga faktor terpenting, yaitu angka kelahiran, angka kematian, serta angka imigrasi, atau perpindahan penduduk (Silastri, 2019). Penelitian dari (Sembiring et al., 2023) menunjukkan bahwa jumlah penduduk

berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis serta sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan data cross section serta time series di 7 Kab/Kota yang Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018 - 2022 (data panel). Studi ini dalam penelitian ini Pengangguran (Y), Upah minimum (X1), IPM (X2), Jumlah Penduduk (X3). Sistem studi ini merupakan proses uji data (data yang diwarisi) di alat uji data menggunakan e views 12. Alasan penggunaan data panel merupakan untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik karena bertambahnya jumlah sampel secara otomatis menunjukkan bertambahnya derajat kebebasan serta menghindari kesalahan penghentian variabel. Dalam model panel, persamaan panel dapat dituliskan dalam bentuk berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

- Y_{it} = Pengangguran (Persen)
- X_{1it} = Upah Minimum (Rupiah)
- X_{2it} = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
- X_{3it} = Jumlah Penduduk (Jiwa)
- α = Koefisien Intersept
- β_i = Koefisien Variabel Independen
- i = Kabupaten/ Kota di Kepulauan Riau
- t = tahun 2018 - 2022
- e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Analisis Pemilihan Model

a. Uji Chiow

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Chow

Effects Test	Sitatic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.253515	(6,25)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.289303	6	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian chow test di tabel 3 diperoleh probabilitas cross section F statistik sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu α = 0,05. Sehingga H₀ ditolak serta H_a di terima maka model yang terbaik untuk digunakan merupakan fixed effect model.

b. Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Hausman

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.529593	3	0.0362

Sumber: Olahan data Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian hausman test di tabel 4, diperoleh probabilitas cross section F statistik sebesar 0,0362 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu α = 0,05. Sehingga H₀ ditolak serta H_a diterima maka model yang terbaik untuk digunakan dalam penellitian ini merupakan fixed effect model.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	UM	IPM	JP
UM	1	0.4701	0.7055
IPM	0.4701	1	0.6878
JP	0.7055	0.6878	1

Sumber: Olahan data Eviews 12

Nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas harus lebih besar dari 0,8, serta sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,8, maka tidak ada multikolinieritas. Di tabel 3 menunjukkan Hasil dari uji korelasi, didapatkan bahwa nilai koefisien masing-masing variabel bebas tidak melebihi 0,8, sehingga model ini tidak memiliki multikolinieritas.

b. Uji heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas

Variable	Prob.
C	0.7647
UM	0.8367
IPM	0.8689
JP	0.7155

Sumber: Olahan data Eviews 12

Jika nilai variabel independen kurang dari 0.05 atau secara signifikan mempengaruhi variabel dependennya, ada indikasi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai variabel independen lebih dari 0.05 atau tidak mempengaruhi variabel dependennya, maka tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas. Hasil estimasi uji Park di atas menunjukkan bahwa jika koefisien variabel independen tidak signifikan atau lebih besar dari 0.05, maka tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas.

3. Model Regresi

Hasil pengujian spesifikasi model menunjukkan bahwa Fix Effect Model (FEM) merupakan yang terbaik di antara ketiganya. Oleh karena itu, hasil dari fixed effect Model akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

Tabel 6. Fixed Model Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	91.2394	36.0654	2.5298	0.0181
UM	0.005557	0.001677	3.3128	0.002
IPM	-1.344963	0.534620	-2.5157	0.018
JP	-0.015245	0.016280	-0.9364	0.358

Fixed Effects (Cross)

BATAM-C	26.81080
BINTAN-C	-0.345137
KARIMUN-C	-2.856545
KEP ANAMBAS-C	-13.81017
LINGGA-C	-14.11038
NATUNA-C	-4.579987
TJIPINANG-C	8.891411

a. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.87491
Adjusted R-squared	0.829885

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square = 0,87 atau sebesar 87% yang berarti model ini dapat menjelaskan 87% variasi dari variabel dependen. Sedangkan sisanya 13% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

b. Uji Statistik Simultan (Uji-f)

Uji-F, atau pengujian statistik simultan, digunakan untuk menilai apakah semua variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen dengan cara yang sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 19,42923 serta signifikansi 0,0000. Dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) maka nilai signifikan $0,0000 < 0,05$. Nilai F tabel diperoleh dari $(\alpha; k-1; n-k) = (0,05; 3-1; 35-2) = (0,05; 2; 33)$ maka diperoleh F tabel sebesar 3,295 yang berarti F hitung $>$ F tabel ($19,4292 > 3,996$), maka variabel independen di penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Statistik Parsial (Uji-t)

- Upah minimum: Hasil dari uji t di variabel upah minimum (X1) mempunyai nilai statistik sebesar 0,0055 serta probabilitas $0,0028 < 0,05$ maka H0 ditolak serta H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh secara positif terhadap pengangguran di wilayah Kepulauan Riau.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Hasil dari uji t di variabel IPM (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar -1,3449 dengan kekuatan sebesar 0,0187 maka H0 ditolak serta H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Kepulauan Riau.
- Jumlah Penduduk: Hasil uji t di populasi (X3) mempunyai koefisien sebesar -0,0152 dengan kekuatan 0,3580 maka H0 diterima serta H1 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat tidak terlalu terdampak dengan adanya pengangguran di Kepri.

B. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan, Dengan demikian, hasil berikut menunjukkan pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, serta jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di provinsi kepulauan riau:

- a) Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran: Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif di tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil ini sesuai dengan teori neoklasik yang diterapkan dalam penelitian ini. Teori neoklasik menyatakan bahwa jika upah meningkat maka pengangguran akan meningkat. Hal ini terjadi karena upah yang tinggi meningkatkan upah serta membuat perusahaan enggan mempekerjakan lebih banyak pekerja, terutama mereka yang memiliki keterampilan rendah atau produktivitas rendah. Selain itu, teori stabilitas upah menjelaskan bahwa upah minimum cenderung tidak turun, bahkan ketika kondisi ekonomi memburuk. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara tenaga kerja serta permintaan, serta jumlah pekerja yang bersedia bekerja di upah tersebut melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia. Kekakuan ini dapat dipicu oleh kesepakatan bersama atau standar ketenagakerjaan yang membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan upah serta jam kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Panjawa Soebagiyo, 2014), (Millenia & Putri, 2021), (Mahendra & Juardi, 2024), (Silvia Luthfiyah, 2024) yang menyatakan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum. serta itu. upah minimum serta berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu mengurangi pengangguran. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pengangguran karena stabilitas upah. Undang-undang

ketenagakerjaan, seperti upah minimum yang tidak dapat dikurangi atau perjanjian perundingan bersama yang membatasi fluktuasi upah, dapat menciptakan ketidaksesuaian antara penawaran serta permintaan tenaga kerja. Peningkatan lapangan kerja akibat kenaikan upah minimum tidak cukup terkonsentrasi serta menyebabkan pengangguran. Sementara itu, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Cahyani & Marhaeni, 2022) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Menurut teori insentif, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan motivasi bekerja serta berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, namun hal ini hanya akan berhasil jika pasar tenaga kerja fleksibel serta lapangan kerja tersedia. Jika tingkat gaji di daerah tersebut rendah, maka pencari kerja tidak akan tertarik bekerja di daerah tersebut serta memilih daerah lain yang tingkat gajinya tinggi (Mochamad Ridwan, Lela Rospida, 2022).

- b) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil ini konsisten dengan hipotesis pertumbuhan baru yang diterapkan dalam penelitian ini. Perlakuan baru menunjukkan bahwa ketika IPM meningkat, tingkat pengangguran menurun. Namun, meskipun IPM Pulau Riau merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera, namun jumlah tersebut jauh lebih tinggi. Teori mismatch menjelaskan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan orang yang mencari kerja serta ketersediaan lapangan kerja. Penelitian lain (Septriani, 2023) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kepri tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Sumatera, karena Kepri menduduki peringkat teratas wilayah dengan IPM tertinggi di Pulau Sumatera - juga terkonfirmasi berdasarkan klasifikasi data transfer. Sejak awal IPM berdampak negatif terhadap pengangguran di Kepulauan Riau. Artinya, setiap kenaikan IPM di Kepri akan menurunkan angka pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kepri memang berhasil menurunkan angka pengangguran, namun ada faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran tersebut, diantaranya merupakan tekanan terhadap jumlah penduduk serta jumlah tenaga kerja yang bekerja, serta perekonomian yang lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2016. Meningkatnya jumlah pekerja aktif menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja (Adriyanto dkk., 2020). Sementara itu, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (A.G. Prasetyo & Bahtiar, 2023) yang menunjukkan bahwa IPM yang tinggi tidak selalu berdampak di penurunan pengangguran, IPM yang lebih tinggi umumnya berarti pendidikan yang lebih baik serta keterampilan yang lebih tinggi di kalangan angkatan kerja. Meskipun hal ini membuat pekerja lebih produktif, hal ini juga dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, terutama jika pertumbuhan lapangan kerja tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lulusan atau pekerja yang berbakat.
- c) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran: Berdasarkan hasil penelitian, perubahan demografi mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini sesuai dengan model Malthus yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Malthus menyatakan bahwa peningkatan jumlah pengangguran dapat meningkatkan jumlah pengangguran karena seiring bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah pekerja pun meningkat, namun tidak demikian halnya ketika mencari pekerjaan. Kesempatan kerja yang lebih sedikit berarti para pekerja harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ada yang tidak mendapatkan pekerjaan

serta menjadi pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widiantari et al., 2024), (Muminin & Hidayat, 2017) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Salah satu penjelasan atas hasil ini merupakan teori perubahan demografi, yang menyatakan bahwa di beberapa daerah, peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi sumber lapangan kerja. Jika kebijakan ekonomi yang tepat serta penciptaan lapangan kerja didukung, lapangan kerja dapat terkonsentrasi, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Di Kepulauan Riau, sebagian besar pengangguran merupakan mereka yang berpendidikan serta menganggur, yaitu mereka yang mempunyai pendidikan menengah serta tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai. Faktor penting lainnya dalam hal ini merupakan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa tingkat perekonomian harus lebih tinggi dari jumlah penduduk untuk menghindari peningkatan pengangguran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk akan mengurangi pengangguran di Kepulauan Riau. Sebab dalam situasi pengangguran di Kepri saat ini, masih banyak masyarakat yang dianggap sarjana serta masyarakat terpelajar justru menganggur. Jelasnya, ketika jumlah penduduk tinggi serta banyak orang terpelajar yang menganggur, maka timbullah pengangguran, karena dalam situasi seperti itu merupakan upaya kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tiga faktor, yaitu rasio upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta jumlah penduduk, berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau secara bersamaan. Namun, terdapat dua faktor yang signifikan secara parsial, variabel upah minimum memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengangguran serta IPM memiliki hubungan negatif signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ditemukan, berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Perluasan Variabel Penelitian: Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel lain yang juga relevan terhadap tingkat pengangguran, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, migrasi, serta partisipasi angkatan kerja. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang komponen yang mempengaruhi pengangguran di daerah tertentu.
2. Analisis Jangka Panjang serta Regional: Disarankan agar penelitian dilakukan dengan cakupan waktu yang lebih panjang untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan perbandingan antardaerah di provinsi lain untuk mengetahui pola-pola pengangguran yang mungkin berbeda di setiap wilayah.
3. Pendekatan Kualitatif untuk Memahami Dinamika Sosial serta Budaya: Selain analisis kuantitatif, penelitian mendatang bisa mengombinasikan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor sosial serta budaya yang mempengaruhi ketenagakerjaan, seperti persepsi masyarakat terhadap pekerjaan tertentu atau pola migrasi tenaga kerja.
4. Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Disarankan untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait upah minimum serta program pengembangan SDM (IPM) untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan serta efektif dalam menekan pengangguran. Hal ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.

5. Penggunaan Metode serta Model Ekonometrika Lanjutan: Penelitian mendatang dapat menggunakan metode ekonometrika yang lebih canggih, seperti Vector Autoregression (VAR) atau Generalized Method of Moments (GMM), untuk melihat hubungan dinamis antarvariabel serta mengurangi bias estimasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.V11i2.2965>
- Alpino, M. A., & Rusdi, M. (2024). Analysis Of Factors That Influence The Provincial Minimum Wage In Sumbagsel. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 397–406. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V12i1.4960>
- Ari Pieter Runturambi, Tri Oldy Rotinsulu, A. O. N. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Manado. *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 97–108.
- Astrid, E., & Soekapdjo, S. (2020). Pengangguran Di Indonesia Inflation , Total Of Population , Hdi , Fdi , And Ddi Influence To Unemployment In Indonesia. *Forum Ekonomi*, 22(2), 319–325. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/forumekonomi/article/view/7343>
- Cahyani, M., & Marhaeni, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sarbagita. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(10), 3701. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.V11.I10.P01>
- Febriani, R., Yefriza, Y., Ekaputri, R., Sitorus, A., & Putri, N. (2021). Inflation, Unemployment, And Economic Growth: Implication On Poverty Level In Bengkulu Province. 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2020.2306624>
- Florennica, E., & Febriani, R. E. (2023). Do Financial Deepening, Government Spending, And Unemployment Benefit Poverty Reduction In Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 193–204. <https://doi.org/10.29259/jep.V20i2.18610>
- Mahendra, T., & Juardi, J. (2024). Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar. *Bulletin Of Economic Studies (Best)*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.24252/best.V4i1.47533>
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.V9i1.5436>
- Mankiw, N. G. (2011). *Pengantar Ekonomi Mikro (Principles Of Economics (Ke 3). Selemba Empat*.
- Michael P. Todaro, S. C. S. (2003). *Pembangunan Ekonomi Jilid 2 : Di Dunia Ketiga (Ed. 8.)*. Akarta : Erlangga, 2003.
- Millenia, E., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106.
- Mita, D., & Usman, U. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), 46. <https://doi.org/10.29103/jeru.v1i2.728>
- Mochamad Ridwan, Lela Rospida, W. N. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Volume 5 N. C:/Users/Lenovo/Downloads/Adeyovana,+Journal+Editor,+3+Mochamad+Ridwan,+Dkk+29-38 (2).Pdf

- Muminin, M. A., & Hidayat, W. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 374–384.
- Mulyadi, M., Rumbia, W. A., & Rachmasari Ariani, W. O. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, 12(1), 749.
- Nashih, M., Primandari, N. R., Muthmainnah, Siregar, S. E., & Utami, T. W. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Memediasi Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Pulau Kalimantan. *Edunomika*, 08(02), 5–24.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(April), 48–54.
- Palinsertagan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1), 65–80.
- Pardosi, A. Y., & Septriani, S. (2023). Determination Factors Of Unemployment In Banten. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 2341–2347. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi/article/view/3337%0ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi/article/download/3337/2725>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 1113–1132. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i3.3516>
- Prasetyo, A. G., & Bahtiar, F. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angka Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Of Development Economics And Social Studies*, 2(4), 760–773.
- Prasetyo, D., Barika, B., Septriani, S., & Armelly, A. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Jumlah Penduduk Terhadap Struktur Ekonomi Primer Provinsi Bengkulu. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 158–166. <https://doi.org/10.37058/Wlfr.V3i2.6074>
- Putra, R., Sukiyono, K., & Purmini, P. (2021). Economic Growth, Inflation, And Regional Minimum Wage: An Empirical Investigation Of The Open Unemployment Rate In Sumatera, Indonesia. *Journal Of Agri Socio Economics And Business*, 3(2), 109–122. <https://doi.org/10.31186/jaseb.3.2.109-122>
- Ramadhani, P. P. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2022.
- Sambaulu, R. A., Rotinsulu, T. O., & Lopian, A. L. C. P. (2022). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115, Indonesia E-Mail: *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 37–48.
- Sembiring, C., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 25–36.
- Septriani. (2023). Analisis Faktor Determinasi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bengkulu. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 83–92. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5795>
- Silastri, N. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singigi. *Jom Fekon*, 4(1), 105–117.
- Silvia Luthfiah, W. S. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Kemiskinan. *Journal Of*

Development Economic And Social Studies, Volume 3 N.
File:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Artikel+6+Jdess+Vol+3+No+1.Pdf

- Simanjuntak, R., & Yefriza, Y. (2024). Analysis Of Factors Affecting Provincial Minimum Wages In Indonesia. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1369–1378. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5081>
- Soedarjadi. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Ed. Revisi)*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sutansyah Effendy, R. (2018). Fokus Ekonomi Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 14, 105–124.
- Tridiana, C., & Widyawati, D. (2018). Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 119–139.
- Wafirrotullaela, & Bawono, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kab./Kota Di Jawa Tengah Tahun 2021). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1254–1266.
- Wee, D. K. P., Kawung, G. M. V., & Masloman, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(2), 133–145.
- Widiantari, I. A. A., Sahri, S., & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 58–64.